

Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang

Oleh :

Sefryan Ardi Saputra, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih*)

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir Kelurahan Mangunharjo. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dengan menggali dan memberdayakan potensi yang dimiliki Kelurahan Mangunharjo. Program ini didasarkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi dan faktor- faktor yang mempengaruhi Program Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Tujuan dari program ini dapat tercapai jika Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir mengikuti kriteria Riant Nugroho yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan teori George C. Edwards III, faktor pendukung dan faktor penghambat adalah komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang telah siap melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sudah dilaksanakan dengan baik. Faktor- faktor yang mempengaruhi adalah (1) kemampuan implementor yang baik dalam menyampaikan informasi, (2) kejelasan informasi yang diperoleh masyarakat, (3) komitmen implementor yang baik dalam melaksanakan program, (4) pemanfaatan wewenang yang dimiliki implementor secara maksimal.

Keywords : Pemberdayaan, implementasi, Faktor pendukung, Faktor penghambat

Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang

Oleh :

Sefryan Ardi Saputra, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih*)

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Program of Coastal Society Economic Empowerment Mangunharjo District, Tugu Sub – District, Semarang City is due to by the still high number of poverty in coastal Mangunharjo District. Therefore, the Marine and Fisheries Agency of the city of Semarang was trying to improve the economy of coastal society by digging and empowering potential Mangunharjo District. The Program is grounded by a decision of the Minister of Marine and Fisheries No. 18 of 2004 concerning the implementation of the General guidelines for economic Coastal Society Economic Empowerment Program.

The purpose of this research is to investigate the implementation process and the factors that affect Coastal Society Economic Empowerment Program. The purpose of this program can be achieved if the implementation of Coastal Society Economic Empowerment Program follow Riant Nugroho criteria that Policy Accuracy, Precision of execution, the target accuracy, precision and accuracy of the process environment. Implementation of Coastal Society Economic Empowerment can not be separated from the factors supporting and inhibiting factors. Based on the theory of George C. Edwards III, factors supporting and inhibiting factors is communication, bureaucratic structure, resources and disposition.

The results of this study indicate that the Departement of Marine and Fisheries Semarang City was ready to implement the Coastal Society Economic Empowerment Program in District Mangunharjo. Implementation of Coastal Society Economic Empowerment has been implemented properly. Factors tha influence is (1) a good implementor ability to deliver information, (2) clarity of information received by the public, (3) good impementor commitment in implementing the program, (4) the use of the authority vested in implementor the fullest.

Keywords : Empowerment, Implementation, Support Factors, Inhibit Factors.

A. PENDAHULUAN

Kelurahan Mangunharjo merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Di Kelurahan Mangunharjo sendiri terdapat 5.598 jiwa warga yang tinggal di Kelurahan Mangunharjo. Kelurahan Mangunharjo merupakan salah satu kelurahan yang memiliki warga miskin yang tinggi, dimana pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk miskin di Kelurahan Mangunharjo sebanyak 317 jiwa. Selain warga miskin di Kelurahan Mangunharjo juga tercatat warga yang pengangguran yaitu sebesar 143 jiwa. Ini tentu bertolak belakang dengan potensi yang dimiliki kelurahan Mangunharjo.

Semenjak tahun 2004, pemerintah melalui Kementerian dan Kelautan dan Perikanan mencangkan sebuah program, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2004. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi. Peningkatan kegiatan kualitas sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan serta peningkatan kesadaran manusia terhadap ekosistem.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2013

KEGIATAN	PEKERJAAN	LOKASI
1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	<ul style="list-style-type: none">• Bibit Mangrove• Website KKMKS• APO• GBPL	Kota Semarang
2. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Kota Semarang	Kota Semarang
3. Hibah atau bantuan sosial bagi masyarakat di Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian Bantuan Sosial sesuai dengan pengajuan proposal dari masyarakat	Kota Semarang
4. Rencana Pengembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir	<ul style="list-style-type: none">• Grand Design Pengelolaan dan Pengembangan Mangrove• Rencana pengadaan lahan Konservasi• Rencana pengembangan wisata bahari	Kota Semarang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang 2013

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh

masyarakat pesisir khususnya masyarakat pesisir yang tinggal di Kelurahan Mangunharjo. Berbagai kegiatan dirancang untuk mendukung berjalannya program ini antara lain pemberian bibit mangrove, pembuatan alat pemecah ombak (APO), pemberian bantuan sosial bagi kelompok masyarakat, dan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Pada implementasinya, pelaksanaan kegiatan – kegiatan pada program ini dalam rangka mencapai tujuan tentu tidak mudah dimana terdapat berbagai faktor pendorong maupun penghambat yang dapat mempengaruhi.

B. TUJUAN

1. Mendiskripsikan implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

C. Teori

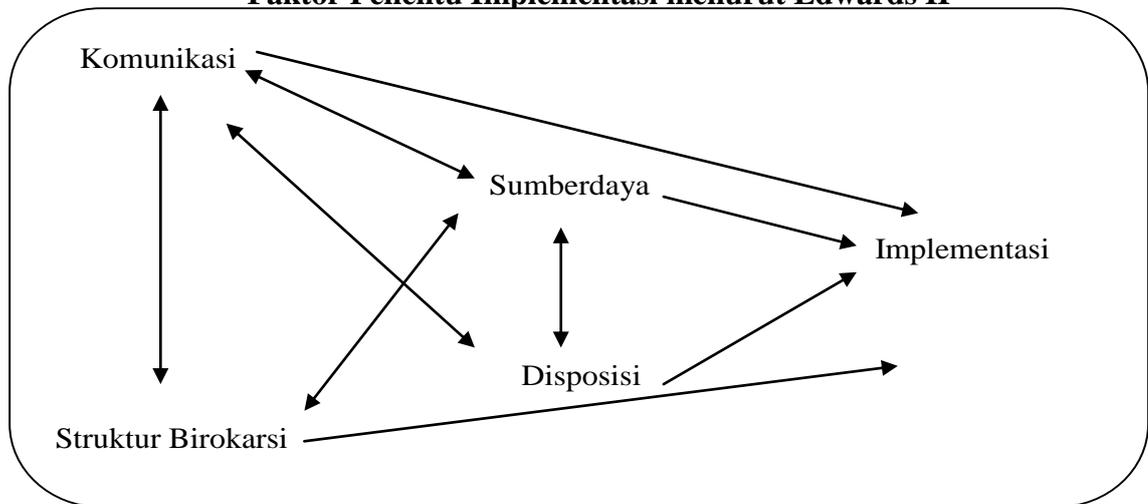
Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010:97) mendefinisikan implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Pendapat lain mengenai implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005:65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan – tindakan kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pengukuran efektifitas implementasi kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah melalui prinsip – prinsip yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Riant Nugroho (2010:650) mengemukakan mengenai prinsip – prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan publik. Prinsip – prinsip tersebut adalah ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak faktor, masing – masing faktor tersebut akan berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang menggunakan model George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Faktor Penentu Implementasi menurut Edwards II



Sumber : George C. Edwards III dalam Subarsono (2010:91)

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian implementasi dengan pendekatan model George C. Edwards III. Fokus penelitian yaitu Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang, peneliti mengambil situs penelitian ini di Kelurahan Mangunharjo serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dikarenakan wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang tingkat masyarakat miskinnya masih tinggi serta Dinas Kelautan dan Perikanan banyak melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dipilih karena memiliki tugas urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang dibidang kelautan yang masih ada di dalam wilayah pesisir Kota Semarang dan masalah potensi yang ada di Kota Semarang.

Teknik pemilihan informasi dalam penelitian ini adalah menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sample dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata – kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto, data statistik, dan lain – lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Pendekatan analisis data yang ditempuh dalam menganalisis data adalah pendekatan *emik* yaitu pendapat informan yang selanjutnya dianalisis karena secara sistematis dengan melakukan tiga langkah secara bersamaan yaitu reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan/ verifikasi. Artinya data – data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut dengan reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya

berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012:330). Teknik triangulasi yang digunakan antara lain triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan wawancara antara informan satu dengan informan yang lainnya dan dengan suatu dokumen yang berkaitan.

E. PEMBAHASAN

1. Proses Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang

a. Ketepatan Kebijakan

Pada implementasinya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini dirasakan oleh masyarakat pesisir Kelurahan Mangunharjo sudah tepat, karena dengan adanya program ini dapat meningkatkan perekonomian mereka. Seperti kegiatan penanaman bibit mangrove, dimana dengan penanam tanaman mangrove yang dapat dijadikan bahan olahan yang bernilai ekonomis dapat meningkatkan perekonomian mereka. Selain mangrove adapula kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang yaitu dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat pesisir sehingga dengan pemberian bantuan ini kelompok masyarakat dapat mengembangkan produknya sehingga dapat memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.

Pada kenyataannya ada beberapa kegiatan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini tidak berjalan sesuai dengan diharapkan. Seperti Gerakan Bersih Pantai dan Laut dan Pembagian wilayah zonasi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya. Program ini tidak berjalan tentu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dimana apabila kita lihat dari faktor struktur birokrasinya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang tidak mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas tentang bagaimana menjalankan program tersebut sehingga kegiatan GBPL dan pembagian wilayah zonasi ini tidak dapat dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu agar kegiatan ini dapat berjalan secara maksimal Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang harus mempunyai Standar Operasional Prosedur yang jelas mengenai program ini sehingga dengan demikian program ini dapat berjalan dengan maksimal.

Faktor lain yang mempengaruhi tidak maksimalnya program ini yaitu dari faktor komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat. Dimana program ini tidak maksimal berjalannya karena kurangnya informasi yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang kepada masyarakat. Dimana konsistensi informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan hanya setiap 3 kali dalam 3 bulan sehingga program ini tidak dijalankan oleh masyarakat karena kurangnya informasi yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang kepada masyarakat.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Efektif atau tidak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi – instansi atau aktor yang

tepat dalam menanganinya. Pada implementasinya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah baik, dimana ini dapat dilihat dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang sudah melaksanakan kegiatan tersebut secara terprogram setiap tahunnya.

Terdapat kekurangan dimana dalam hal pengimplementasian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini pihak Kelurahan Mangunharjo kurang ikut berperan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini. Pihak kelurahan dalam program ini hanya sebatas memfasilitasi saja tanpa ikut terlibat langsung dalam melaksanakan program tersebut. Faktor lain yang ikut mempengaruhinya yaitu apabila dilihat dari sumber daya, dimana tidak adanya informasi mengenai tata cara pelaksanaan. Tidak adanya informasi mengenai tata cara pelaksanaan ini juga mempengaruhi pihak Kelurahan Mangunharjo hanya menjadi fasilitator dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini. Dimana dengan tidak adanya tata cara pelaksanaan ini membuat pihak kelurahan hanya mengikuti perintah atau himbauan dari dinas tanpa tahu harus melakukan apa pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini.

c. Ketepatan Target

Salah satu indikator efektif dari implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yaitu dengan melihat dari ketepatan target, dimana dalam hal ini mampu menangani laju tingkat kemiskinan yang terdapat di wilayah pesisir Kelurahan Mangunharjo yang semakin lama meningkat. Dilihat dari hasil penelitian lapangan dimana kegiatan dalam program ini harus dilakukan untuk demi meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat pesisir.

Pada implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah sesuai dengan target. Ini dapat dilihat dari kegiatan – kegiatan yang berbasis pada masyarakat, seperti pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat di Kelurahan Mangunharjo. Sudah sesuai target dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini tentu saja dipengaruhi beberapa faktor – faktor yang mendukung.

d. Ketepatan Lingkungan

Pada implementasinya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah tepat bagi masyarakat, karena kegiatan – kegiatan yang terdapat di dalam program ini sudah mampu meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat. Seperti pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat untuk dikembangkan sehingga dengan bantuan tersebut masyarakat mampu meningkatkan kemampuan ekonominya. Namun, terlepas dari itu terdapat suatu kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini, dimana menurut hasil wawancara informan didapatkan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang menyimpang dimana bantuan yang diberikan dijual oleh kelompok tersebut.

Kendala yang terjadi ini tentu tidak lepas dari faktor – faktor yang mempengaruhinya. Dimana dilihat dari struktur birokrasinya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang terhadap program

ini dirasakan kurang. Untuk pengawasan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang hanya 4 sampai 5 kali dalam 1 tahun melakukan pengawasan ini. Tentu saja ini sangat kurang sehingga timbul kendala seperti ini. Seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini dilakukan setiap bulan sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dapat mengetahui perkembangan dari bantuan yang mereka berikan dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan ini.

e. Ketepatan Proses

Pada implementasinya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah sesuai dengan proses yang ditentukan seperti pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini yaitu dengan tingginya permintaan masyarakat membuat bantuan tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.

Kendala ini tentu saja tidak lepas dari beberapa faktor – faktor yang mempengaruhinya. berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhinya yaitu dari faktor sumber daya. Dimana sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini dana yang dianggarkan dirasa kurang, hal ini disebabkan karena dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat yang harus diberdayakan sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan. Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang tentu akan secara bertahap memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan agar kualitas dan kuantitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.

2. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

a. Faktor Pendukung

- Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang sudah dapat berjalan dengan baik sehingga Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terencana dengan baik.
- Kemampuan Implementor dalam mengkomunikasikan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang sudah baik sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat
- Penyaluran komunikasi tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sudah baik dimana ini dapat terlihat dari

strategi yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dalam menyampaikan informasi tersebut.

- Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah sesuai ini dapat dilihat dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan porsi yang sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

- Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini.
- Buruknya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dengan pihak Kelurahan Mangunharjo.
- Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang terhadap program ini.
- Kurangnya jumlah sumber daya baik itu personil maupun sumber daya keuangan sehingga pelaksanaan program ini tidak maksimal.

F. PENUTUP

Simpulan

Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang ini sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini dimana masih belum berjalannya beberapa kegiatan seperti Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan penyusunan wilayah zonasi sesuai dengan potensi daerahnya. Selain itu masih kurangnya koordinasi antara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dengan pihak Kelurahan Mangunharjo. Masih kurangnya petugas yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sehingga program ini tidak berjalan maksimal

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi langkah – langkah yang mungkin diambil untuk mencapai keberhasilan dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang langkah – langkah yang mungkin diambil adalah sebagai berikut :

- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang harus mempunyai Standar Operasional Prosedur yang jelas mengenai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini sehingga dengan demikian program ini dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan standar yang ditentukan.

- Untuk konsistensi informasi yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang harus memberikan informasi tersebut secara konsistensi setidaknya dalam 1 bulan ada 3 kali baik itu pertemuan maupun sosialisasi.
- Untuk kerjasama dan koordinasi sebaiknya pihak Kelurahan Mangunharjo dilibatkan dalam setiap pembuatan program yang akan dilakukan didaerahnya.
- Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, seharusnya dilakukan setiap bulan sehingga dapat mengetahui perkembangan program ini.
- Untuk mengatasi kekurangan sumber daya keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang harus memberikan secara bertahap bantuan kepada kelompok masyarakat.

Daftar Pustaka

Kusumanegara, Solahuddin 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Tim Penyusun Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2010. *Laporan Akhir: Pemetaan Potensi, Kerusakan, Model Rehabilitasi Kawasan Pesisir Kota Semarang*. Semarang : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negeri*. Jakarta : Bumi Aksara